KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Subsidi energi 210 T, tantangan berat produksi migas
Tanggal : Minggu, 31 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Subsidi Energi 210 T

Tantangan Berat Produksi Migas

ALOKASI subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 210,1 triliun, dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Anggota Komisi XII DPR Meitri Citra Wardani menjelaskan, alokasi tersebut naik dari APBN 2025 sebesar Rp 186,9 triliun. Rinciannya, subsidi listrik Rp 101,72 triliun, subsidi BBM Rp 25,1 triliun dan subsidi LPG 3 kilogram Rp 80,3 triliun.

"Subsidi energi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun kebijakan ini harus memperhatikan ketepatan sasaran berbasis data dan ketahanan fiskal di tengah usaha transisi energi," kata politikus PKS itu, Sabtu (30/8/2025).

Meitri mengapresiasi terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menjadi landasan pembentukan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Gugus data tunggal baru ini dinilai mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.

"Dengan DTSEN, kebocoran subsidi bisa diminimalisasi, karena data yang mutakhir akan memastikan subsidi tepat sasaran dan lebih adil," tegas legislator asal Dapil Jawa Timur VIII itu.

Meski alokasi subsidi naik, Meitri menyoroti penurunan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari 82 dolar AS per barel dalam APBN 2025 menjadi 70 dolar AS dalam RAPBN 2026.

Di sisi lain, target produksi migas juga turun: lifting minyak dari 635 ribu barel per hari (bopd) menjadi 610 ribu bopd, dan lifting gas dari 1.033 ribu barel setara minyak per hari (boepd) menjadi 984 ribu boepd.

"Ketika produksi migas turun, sementara subsidi energi naik, maka ketahanan energi kita menghadapi tantangan serius. Jika tidak ada mitigasi, beban subsidi bisa terus meningkat tanpa diimbangi kapasitas produksi nasional yang memadai," jelasnya.

Dia juga menyoroti faktor geopolitik, khususnya ketegangan di Timur Tengah antara Israel dan Iran, yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak global.

"Pemerintah perlu menyiapkan strategi mitigasi agar pasokan energi tetap stabil dan ruang fiskal lebih luas tanpa membebani rakyat," tambahnya.

Meitri menekankan pengendalian subsidi harus sejalan dengan percepatan diversifikasi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). Alokasi RAPBN 2026 sudah memuat anggaran untuk PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan program listrik desa. ■ PYB